

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini, kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan utama Operasi Bendungan meliputi kegiatan-kegiatan seperti:
 - a. Kegiatan penyusunan Rencana Operasi Tahunan Waduk (RTOW)
 - i. Penyusunan RTOW
 - ii. Sosialisasi RTOW
 - iii. Evaluasi RTOW
 - b. Operasi peralatan hidromekanikal
 - i. Pengoperasian pintu stangdrat elektrik
 - ii. Pengoperasian pintu stangdrat manual
 - c. Kegiatan operasional rutin
 - i. Kebutuhan operasional rutin
 - ii. Piket operasi
 - iii. Piket banjir
 - iv. Penyusunan laporan bulanan
 - v. Rapat internal
 - d. Perjalanan dinas
 - i. Koordinasi ke UPB
 - ii. Koordinasi ke Kabupaten
 - iii. Koordinasi ke Jakarta

2. Biaya pelaksanaan operasi bendungan pada Bendungan Delingan sebesar Rp442.934.226; Biaya pelaksanaan operasi bendungan pada Bendungan Ketro sebesar Rp438.827.972; biaya pelaksanaan operasi bendungan pada Bendungan Cengklik sebesar Rp383.561.468.
3. Kegiatan yang paling membutuhkan biaya terbesar Bendungan Delingan, Bendungan Cengklik, dan Bendungan Ketro adalah kegiatan Piket Operasi Harian; Kegiatan yang membutuhkan biaya terkecil pada Bendungan Delingan adalah kegiatan Sosialisasi RTOW, sedangkan pada Bendungan Cengklik dan Bendungan Ketro kegiatan yang membutuhkan biaya terkecil adalah Pengoperasian Peralatan Hidromekanikal. Biaya untuk upah petugas dan tenaga kerja menjadi biaya terbesar untuk pelaksanaan operasi bendungan, hal ini dapat diperhitungkan dalam prioritas pengadaan barang ataupun jasa.
4. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kegiatan pada biaya terkecil antara Bendungan Delingan dengan Bendungan Cengklik dan Bendungan Ketro adalah adanya elemen peralatan hidromekanikal elektrik pada Bendungan Delingan yang tidak dimiliki oleh Bendungan Cengklik dan Bendungan Ketro, serta jumlah elemen yang dimiliki Bendungan Delingan jauh lebih banyak dibanding Bendungan Cengklik dan Bendungan Ketro. Secara umum, faktor yang mempengaruhi perbedaan biaya adalah perbedaan Harga Satuan Dasar, perbedaan karakteristik bendungan sehingga mempengaruhi perhitungan koefisien, perbedaan frekuensi, perbedaan jenis elemen, dan perbedaan jumlah elemen.

5.2 Saran

Saran yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan kajian lebih mendalam mengenai perhitungan biaya operasi bendungan berdasarkan pedoman dengan kondisi asli lapangan.
2. Melakukan tinjauan terhadap faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan operasi bendungan.

3. Menganalisis prioritas pembiayaan kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan operasi bendungan.
4. Membuat analisis perbandingan antara kondisi ideal yang mengacua pada pedoman dengan kondisi eksisting di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Project Managemen Institute. (2017), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6th Edition*. Project Management Institute, Pennsylvania.
- Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. (2014), *Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum*, Jakarta.
- Kawet, Rifana. *Konstruksi Bangunan*. (2018), Deepublish, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2003), “Pedoman Operasi, Pemeliharaan, dan Pengamatan Bendungan Bagian 2 Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Surat Edaran Nomor : 01/SE/D/2016 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Surat Edaran Nomor : 01/SE/D/2016 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Bendungan”, Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2007), “No.32 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi”, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019), “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020”, Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Sragen. (2019), “Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2020”, Sragen.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2019), “Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2020”, Karanganyar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2017), “Modul Pengetahuan Dasar AKNOP Jaringan Irigasi”, Bandung.

Kementerian PUPR Targetkan 29 Bendungan Selesai Sampai Akhir (2019), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://www.pu.go.id/berita/view/16788/kementerian-pupr-targetkan-29-bendungan-selesai-sampai-akhir-2019>

Perlu Pengawasan Ketat dan Berkelanjutan untuk Cegah Kegagalan Bendungan. (2019), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://pu.go.id/berita/view/17102/perlu-pengawasan-ketat-dan-berkelanjutan-untuk-cegah-kegagalan-bendungan>